
Moderasi Beragama yang Kosmopolit (Mencegah Konflik dalam Masyarakat Sodong yang Harmoni)

Rufi'ah¹, Aksin Wijaya², Nur Rif'ah Hasaniy³

¹² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia

³ Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia

correspondence e-mail: nurrifahhasaniy@mail.ugm.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/04/01;

Accepted: 2024/05/11; Published: 2024/06/7

Abstract

This article focuses on the theme of inter-religious relations in Indonesia with interrelated sub-topics: the history of the struggle of thought in Islam, the concept of religious moderation, and looking at religious life in a hamlet that has been used as a hamlet of religious tolerance in Ponorogo, namely the hamlet of Sodong. The history of thought and religious moderation are used to discuss the above issues. The history of thought is intended to trace the struggle of thought in history, while religious moderation is used as an analytical tool and solution offering to prevent the emergence of potential conflicts in the Sodong Community, Ponorogo. Viewed from the perspective of the history of thought, religious moderation has actually been developing for a long time, namely since the early period of the presence of Islam, and its presence has always been a response to radical thoughts and attitudes in religion. The religious moderation that I think is appropriate to use in Indonesia is religious moderation that is dialogical with reality, because Islam basically has a theoretical, dialogical and practical character. With the basic character of Islam, we can see reality in an appreciative, critical and productive way. We can appreciate the phenomenon of tolerant religiosity, of course without reducing critical attitudes and new solutions in overcoming potential conflicts in the name of religion, such as in Sodong Ponorogo.

Keywords

Moderation, Cosmopolitan, And Potential Conflict



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan Tuhan memberikan haknya dengan menurunkan suatu agama yang bersifat fitri, yakni agama Islam. Selain bermakna sebagai sikap kepasrahan total hamba kepada Tuhan, Islam juga bermakna sebagai ajaran yang menghistoris karena ia diperuntukkan bagi manusia yang hidup dalam realitas sejarah.¹ Islam dengan makna pertama bersifat ideal, absolut, universal dan tidak mengalami perubahan, sedang

¹ Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019).

Islam dengan makna kedua bersifat praksis, relatif, partikular, mengalami perubahan dan berdialog dengan konteks sejarah. Yang pertama bisa disebut Islam ideal, yang kedua disebut Islam historis.

Karena Islam historis berdialog dengan realitas sejarah peradaban manusia, tema-tema yang dibicarakan al-Qur'an sebagai sumber asasi Islam senantiasa berhubungan dengan tema-tema aktual yang terjadi dalam realitas sejarah yang menjadi metra dialognya, termasuk tentang kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama. Dalam dialog itu muncul pertanyaan-pertanyaan: apakah harus ada negara berdasar agama, apakah bangsa harus berdasar kesamaan agama, dan bagaimana hubungan antar umat beragama, apakah harmoni atau konflik.

Tulisan ini difokuskan pada tema hubungan antara umat beragama dengan menggunakan perspektif analisis konten dengan sub bahasan: mengapa moderasi beragama itu penting? bagaimana problem pemahaman atas agama? bagaimana sejatinya konsep moderasi beragama? serta menengok kehidupan beragama di sebuah dusun yang selama ini dijadikan dusun toleransi beragama di Ponorogo, yakni dusun Sodong.

Sajian tentang konsep moderasi beragama dimaksudkan untuk menegaskan bahwa moderasi beragama itu penting. Sedang sajian tentang kondisi beragama di Sodong dimaksudkan untuk menjadikan moderasi beragama itu sebagai perangkat analisis dan tawaran solutif untuk mencegah munculnya potensi konflik di Sodong. Yang diharapkan dari tulisan ini adalah agar moderasi beragama tidak hanya ditempatkan sebagai pemikiran yang bersifat teoritis, tetapi sebagai pemikiran yang berwatak dialogis dan praksis, agar ia menjadi bermakna untuk menjaga harmoni dalam kehidupan beragama sekaligus menyingkap dan mengatasi potensi konflik di Masyarakat yang plural ini, seperti di dusun Sodong Ponorogo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali pengalaman hidup dan pemaknaan yang diberikan masyarakat Sodong terhadap konsep moderasi beragama dalam konteks masyarakat kosmopolit.² Fenomenologi dipilih karena fokusnya pada pengalaman subjektif dan persepsi individu terhadap realitas sosial. Penelitian ini berupaya memahami pengalaman anggota masyarakat dalam menjaga harmoni melalui pendekatan agama yang moderat dan kosmopolit, serta bagaimana mereka menyikapi potensi

² Febe Friberg and Joakim Öhlén, "Fenomenologi," *Kvalitativa Metoder Helt Enkelt!* (Klingberg G & Hallberg U, Red.), 2021, 165–85.

konflik yang mungkin timbul.

Partisipan penelitian ini adalah masyarakat Sodong yang memiliki beragam latar belakang agama, sosial, dan budaya. Kriteria partisipan meliputi individu yang aktif berinteraksi dengan komunitas berbeda, tokoh agama, serta warga yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat kosmopolit. Teknik pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih partisipan yang diyakini memiliki pengalaman langsung terkait topik penelitian. Jumlah partisipan akan disesuaikan hingga mencapai saturasi data, di mana informasi dari partisipan tidak lagi memberikan perspektif baru.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen terkait. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberi ruang bagi partisipan dalam mengungkapkan pengalaman mereka secara mendalam mengenai moderasi beragama dan upaya pencegahan konflik. Observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di Sodong untuk melihat interaksi nyata antar komunitas. Studi dokumen meliputi analisis dokumen lokal, laporan kegiatan, dan catatan peristiwa yang berkaitan dengan kerukunan beragama.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik fenomenologi, yang dimulai dengan transkripsi wawancara dan identifikasi tema-tema utama dari pengalaman yang disampaikan partisipan. Langkah-langkah analisis mencakup membaca transkrip secara cermat, mengidentifikasi makna dan tema-tema umum, melakukan kategorisasi, dan memahami esensi pengalaman partisipan. Temuan diharapkan dapat menunjukkan makna yang diberikan masyarakat terhadap moderasi beragama yang kosmopolit serta peran konsep ini dalam menciptakan harmoni.

Untuk memastikan validitas, dilakukan teknik triangulasi data melalui perbandingan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. Member checking juga diterapkan untuk meminta konfirmasi dari partisipan terkait hasil temuan awal yang telah diinterpretasikan oleh peneliti. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, termasuk menjaga anonimitas partisipan, meminta persetujuan mereka, dan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam yang bermanfaat dalam mengembangkan strategi moderasi beragama yang dapat mencegah konflik di masyarakat kosmopolit lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Moderasi Beragama

Istilah moderasi beragama (*al-wasatiyah*) yang disinggung di atas berhubungan dengan banyak konteks, bisa berkaitan dengan posisi agama, posisi pemikiran keagamaan dan sikap dalam beragama. Berikut ini, akan disajikan sejarah perkembangan pemikiran tentang moderasi beragama itu, dan mengapa moderatisme beragama itu penting bagi kita yang hidup di Indonesia khususnya.

Dalam konteks beragama, Islam yang dibawa nabi Muhammad ini sejatinya sebagai agama yang berada di tengah-tengah antara agama Yahudi yang dibawa nabi Musa yang berorientasi materi dan agama Nasrani yang dibawa nabi Isa yang berorientasi spiritual.³ Islam menawarkan agar urusan materi yang bersifat duniawi diseimbangkan dengan urusan spiritual yang bersifat ukhrawi. Kerjakan urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kerjakan urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.

Hubungan tiga kondisi itu berlanjut pada periode pasca nabi. Pergumulan pemikiran dan bersikap dalam Islam pernah terjadi pada masa Khalifah al-Rasiyidah terutama pada masa Khalifah ke empat, Ali bin Abi Thalib, yang penuh dengan konflik perebutan kekuasaan. Ketika hendak melakukan gencatan senjata antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dengan Mu'awiyah yang hendak merebut kekuasaan dari tangan Ali, muncul satu kelompok yang disebut Khawarij, sempalan dari kubu Ali. Ketiganya bergumul memperebutkan kebenaran dengan menggunakan al-Qur'an sebagai justifikasinya.⁴

Di satu sisi, Khawarij menggunakan al-Qur'an untuk menjustifikasi pemikiran dan sikapnya yang ekstrim dengan menuduh Ali dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Tuhan. Di seberang sana, Muawiyah menggunakan teologi Jabariyah untuk menjustifikasi trik dan strategi politiknya yang kasar, bahwa tindakannya dalam merebut kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Lalu Ali mengambil jalan tengah "moderat" dengan menegaskan bahwa sejatinya kita tidak boleh berdebat apalagi merebut kekuasaan dengan menggunakan al-Qur'an, karena kitab suci umat Islam itu mengandung banyak makna.⁵ Al-Qur'an itu benar, tetapi bisa menjadi tidak benar ketika digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Begitu juga bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, karena manusia diberi kekuatan dan kebebasan oleh

³ Lihat, Qadi Abdur Rasyid, *al-Manhaj al-Islami li al-Wasatiyah wa al-I'tidal*, (Kairo: Dar al-Salam, 2010); al-Amir Mahfuz Abu Isyah, *al-Wasatiyah fi al-Islam: Dirasah Hawla Manhaj al-Wasatiyah al-Islamiyah, Fikran wa Mumarasatan*, (Kairo: Dar al-Basya'ir, 2015).

⁴ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 19-22

⁵ Aksin Wijaya, "Menafsir al-Qur'an Secara Bijak: Beruswah Hasanah pada Cara Berkomunikasi Tuhan" dalam Aksin Wijaya (penyunting) *Dinamika Pemikiran dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSod, hlm. 28-57); Aksin Wijaya, *Fenomena Berislam: Genalogi dan Orientasi Berislam Menurut al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2022), hlm. 30-59

Tuhan untuk berbuat dan bertanggung jawab atas kebebasannya.

Pergumulan pemikiran dan bersikap di kalangan pemikir muslim juga muncul pada abad pertengahan Islam, periode pembentukan mazhab pemikiran Islam. Misalnya dalam bidang fikih, moderatisme disematkan pada Imam Syafi'i;⁶ dalam bidang kalam, moderatisme disematkan pada imam Asy'ari; dan dalam bidang tasawuf, moderatisme disematkan kepada imam al-Ghazali yang nantinya, moderatisme mereka tercermin pada aliran atau paham Islam Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja). Di Indonesia, label Islam Ahlussunnah wa al-Jama'ah tercermin pada organisasi keagamaan terbesar, Nahdatul Ulama' (NU), yang kemudian menawarkan prinsip-prinsip berfikir dan bertindak: I'tidal (tegak, lurus), tasammuh (toleransi), Tawassut (moderat), tawazun (Seimbang), dan masalah Amah.

Peristiwa pergumulan pemikiran keislaman antara yang radikal dengan yang moderat yang tidak kunjung usai ini sejatinya menyadarkan kita betapa pentingnya penguatan moderatisme Islam di Masyarakat yang multikultur dan multireligius seperti Indonesia ini, karena radikalisme Islam selalu muncul dalam setiap babakan sejarah manusia, terutama dalam dunia Islam. Karena nilai pentingnya itu, di Timur Tengah, sudah banyak karya-karya yang menulis tentang moderatisme Islam, karena hampir kebanyakan radikalisme Islam lahir dari sana, seperti HT, Jama'ah Islamiyah, Ikhwan al-Muslimin dan sebagainya. Di Indonesia, istilah moderasi beragama juga muncul bersamaan dengan derasnya kehadiran radikalisme agama yang terinspirasi dari Timur Tengah itu melalui teror baik wacana maupun fisik.

Mantan Menteri Agama RI (2014-2019), Lukman Hakim Saifuddin adalah salah satu tokoh yang mempromosikan pemikiran moderasi beragama di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk mengimbangi derasnya gerakan radikalisme agama, yang di Indonesia dijual untuk kepentingan politik praktis dengan contoh kasus Pilkada DKI Jakarta, seperti HTI dan FPI. Gagasan ini kemudian ditransformasikan secara massif oleh Menteri Agama berikutnya (2020-2024), Yaqut Cholil Qoumas, melalui pendirian Rumah Moderasi Beragama (RMB) di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta, dan Lembaga Keagamaan yang berada di bawah naungan Kemenag, serta memassifkan program workshop, FGD dan berbagai pelatihan, penelitian, penulisan buku melalui program Litabdimas, termasuk melalui KPM moderasi beragama.

⁶ Walaupun pandangan seperti ini mendapat kritik dari dua pemikir berikut: Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Syafi'i wa ta'sis al-Ideologiyah al-wasatiyah* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1996); George Tarabichi, *min Islam al-Qur'an ila Islam al-Hadis, al-Nasy'ah al-Musta'nafah*, (Bairut: Dar al-Saqi, 2011)

Problem Pemahaman Atas Agama

Ada dua kata kunci yang perlu ditegaskan perbedaannya untuk mengetahui bagaimana agama itu dipahami, yakni agama dan beragama. Istilah agama mengacu pada ajarannya, sedang beragama mengacu pada subyeknya. Keduanya saling berhubungan, tetapi tidak selamanya sejalan. Seseorang disebut tidak sejalan dengan agama, jika dalam beragama dia mengabaikan ajaran agamanya. Untuk mengetahui, apakah seseorang itu beragama sejalan dengan ajaran agamanya atautkah tidak, dan bagaimana sejatinya orang beragama, terlebih dulu saya akan mendeskripsi watak ajaran agam (Islam) itu sendiri, baru menjelaskan bagaimana seseorang beragama.

Pertama, Islam adalah agama moderat.⁷ Moderatisme Islam bisa dilihat dari penggunaan istilah, serta beberapa indikasi yang ditampilkan al-Qur'an. Istilah moderasi disepadankan dengan istilah wasathiyah dalam bahasa arab. Secara semantik, istilah wasathiyah mempunyai ragam makna, dan makna-makna itu sering digunakan, baik di dalam al-Qur'an maupun pemikiran Islam, yakni keadilan, istiqomah, kebaikan, keamanan, kekuatan, dan kesatuan.

Di dalam al-Qur'an, istilah wasathiyah dengan berbagai bentuknya disinggung sekitar empat kali, dan bentuk-bentuk itu dikaitkan dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam (al-Baqarah: 143) digunakan bentuk "wasathan", dan dikaitkan dengan istilah ummat, sehingga muncul ungkapan "ummatan wasatha"; di dalam (al-Baqarah: 238) digunakan bentuk "al-Wustha", dan dikaitkan dengan ibadah shalat wajib, sehingga muncul ungkapan "al-Shalat al-Wustha"; di dalam (al-Qolam: 28) digunakan bentuk "awsathun", dan dikaitkan dengan perkataan suatu kelompok, sehingga muncul ungkapan "qala awsathuhum"; di dalam (al-Maidah: 89) digunakan bentuk "awsathun" sehingga muncul ungkapan "min awsathima"; dan di dalam (al-Adiyat: 4-5) digunakan bentuk "wasathna", sehingga muncul ungkapan "fawasathna bihi".

Al-Qur'an juga menampilkan beberapa ayat yang menunjukkan indikasinya pada ajaran bahwa yang tengah-tengah merupakan perkara yang paling baik (khairul al-umuri awsathuha), dan ayat-ayat itu berbicara tentang kasus yang berbeda-beda. Al-Qur'an (Al-Baqarah: 68) berbicara tentang Sapi Betina yang diperdebatkan orang-orang bani Israil; (al-Isra':29) berbicara tentang sifat kikir yang disebut belenggu; (al-Isra': 110) berbicara tentang suara yang sejatinya tidak terlalu nyaring dan terlalu pelan ketika mengerjakan ibadah shalat; (al-Furqan: 68) berbicara tentang larangan berlebihan dalam berberinfaq; (al-Baqarah: 201, al-Qashash:77) berbicara tentang

⁷ Yusuf Qardowi, *Fiqhul Wasathiyah al-Islamiyah wa al-Tajdidiyah "ma'alim wa manarat"*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2010), hlm. 33-35

keharusan menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat; (al-Jumu'ah: 9-10) berbicara tentang hubungan shalat jum'at yang merupakan urusan akhirat dengan mencari harta yang merupakan urusan duniawi; dan (al-Maidah: 87-88) berbicara tentang larangan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.

Indikasi moderatisme Islam juga ditunjukkan oleh penegasan al-Qur'an bahwa para nabi dan khususnya nabi Muhammad diutus untuk bersikap moderat "menegakkan keadilan" (al-Hadid: 25), dan pada saat yang sama, diperintah untuk mengatakan kepada kaum Ahli Kitab agar jangan berlebihan dalam beragama (al-Ma'idah:77). Sejalan dengan itu, ummat Islam yang menjadi ummat nabi Muhammad oleh al-Qur'an disebut sebagai ummat yang berada di tengah-tengah, "ummatan wasata" (al-Baqarah:143). Ummat yang berada di tengah-tengah itu oleh al-Qur'an disebut sebagai ummat yang paling baik "khairul ummah", salah satu makna dari istilah wasathiyah, "kamu sekalian (wahai ummat Islam) adalah ummat terbaik (khairu ummah) yang dihadirkan Tuhan kepada umat manusia di dunia ini" (Ali Imran:110).

Kedua, sebagai agama yang "moderat", Islam tidak selamanya dipahami secara moderat oleh para penganutnya. Ada kelompok yang memahaminya secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, dan ada kelompok yang memahaminya secara moderat.

Dalam sejarah gerakan Islam, kelompok yang selama ini disebut ekstrim kanan adalah Khawarij, Wahhabi dan Islamisme. Dikatakan ekstrim kanan, karena mereka cenderung "berlebihan" dalam beragama. Keberagamaan yang berlebihan itu terjadi karena mereka terlalu mengutamakan "menuhankan" teks (al-Qur'an dan hadis nabi), sembari mengabaikan akal dan konteks dalam memahami agama. Kebenaran tekstual yang mereka peroleh itu diyakini sebagai yang paling benar, sembari menyalahkan kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Mereka berprinsip "pendapat saya benar dan tidak mungkin salah, sedang pendapat orang lain salah dan tidak mungkin benar". Mereka pun mempraktikkan keberagamaannya secara kaku, dan tidak jarang memaksakannya kepada pihak lain, sehingga bisa melahirkan kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik.⁸

Di ujung sana, muncul kelompok beragama yang dinilai cenderung "mengabaikan" agama. Keberagamaan yang "abai" yang disebut ekstrim kiri ini mengutamakan akal dan konteks, sembari mengabaikan teks (al-Qur'an dan hadis nabi) dalam memahami agama. Kebenaran rasional dan kontekstual yang mereka peroleh itu seolah mengurangi nilai-nilai agama, berikut

⁸ Sajian lengkap tentang masalah ini, lihat Aksin Wijaya, Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung:Mizan, 2018).

komitmennya dalam beragama. Mereka menganut prinsip berfikir “pendapat saya benar, begitu juga pendapat orang lain”. Umar bin Khattab, dan aliran rasionalis Islam abad pertengahan, Muktazilah bisa disebut sebagai wakil kelompok ini.

Sahabat nabi yang fenomenal itu dianggap, bukan hanya mengabaikan teks, tetapi juga mengabaikan ajaran normatif Islam. Beberapa di antaranya adalah: Umar menolak memberikan zakat kepada muallafati qulubihim yang secara normatif disebutkan di dalam al-Qur'an mendapat bagian zakat (al-Taubah: 60); menolak memberikan harta rampasan perang kepada mereka yang terlibat dalam peperangan melawan musuh yang secara normatif ditetapkan di dalam al-Qur'an (al-Anfal:1); dan tidak memotong tangan pencuri “di masa paceklik” yang secara normatif ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an (al-Maidah:38).⁹

Sementara itu, Muktazilah mengutamakan bahkan “menuhankan” akal daripada teks (al-Qur'an dan hadis nabi) dan konteks. Menurut mereka, akal dengan sendirinya bisa mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang zalim dan yang adil, tanpa bantuan wahyu Ilahi. Menurut mereka, nilai yang baik dan yang buruk terletak pada dirinya sendiri, bukan pada yang lain. Siapapun, termasuk Tuhan menurut mereka “wajib” berbuat baik, berbuat benar dan bertindak adil. Begitu juga, manusia dan Tuhan wajib menghindari perbuatan buruk.

Sedang kelompok moderat mengambil posisi yang tidak “berlebihan” dan juga “tidak abai” dalam beragama. Keberagamaan yang moderat itu lahir dari suatu metode yang memadukan secara dialogis antara teks (al-Qur'an dan hadis), akal dengan konteks. Kebenaran moderat yang mereka peroleh itu mengakomodir dua kecenderungan: kanan dan kiri. Mereka menganut prinsip berfikir “pendapat saya benar, tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tetapi ada kemungkinan benar”. Kelompok ini diwakili para pendiri mazhab pemikiran Islam, seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dalam bidang fikih; Imam Asy'ari dan Imam al-Maturidi dalam bidang kalam; Imam al-Junaidi dan Imam al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Mereka semua dikenal dengan nama Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yang dinilai sebagai mazhab jalan tengah.

Moderasi Beragama yang Kosmopolit

Secara teoritis, masing-masing kelompok itu bisa bergeser dan berubah posisi. Kelompok ekstrim kanan bisa berubah menjadi ekstrim kiri dan moderat (terlepas dari prinsip berfikirnya yang kaku), begitu juga sebaliknya; kelompok ekstrim kiri bisa berubah menjadi moderat; dan

⁹ Muhammad Said al-Asymawi, *al-Islam al-Siyasi*, Kairo: Dar al-Maarif, 2004, hlm. 97-100, dan 233.

kelompok moderat bisa berubah menjadi ekstrim kanan dan atau ekstrim kiri. Pergeseran ini sebagai sesuatu yang lumrah terjadi dalam sebuah pemikiran, karena realitas yang mendasari lahirnya kelompok-kelompok itu senantiasa mengalami perubahan. Pergeseran itu terkadang membawa dampak positif misalnya, ketika kelompok ekstrim kanan dan kiri bergeser menjadi moderat, terkadang juga membawa dampak negatif, misalnya ketika kelompok ekstrim kiri dan kelompok moderat bergeser menjadi ekstrim kanan.

Kelompok ekstrim kiri dan kelompok moderat bisa berubah wujud menjadi ekstrim kanan jika terjadi pergeseran paradigmatis, dari rasionalisme dan moderatisme sebagai paradigma dalam beragama, bergeser ke rasionalisme dan moderatisme sebagai ideologi. Pergeseran itu bisa terjadi jika rasionalisme dan moderatisme beragama itu dibakukan sebagai ajaran formal Negara. Secara epistemologis, pergeseran ini tentu saja membawa dampak serius. Ketika masih dalam posisinya sebagai paradigma, rasionalisme dan moderatisme masih berproses terus menerus dan terbuka atas kehadiran yang lain. Tetapi ketika keduanya berubah wujud menjadi ideologi, ia berhenti berproses dan tertutup dari kehadiran yang lain.

Meminjam analisis Khaled Abou el-Fadl, pergeseran paradigma beragama itu dapat menyebabkan terjadinya pergeseran otoritas keilmuan, dari “otoritas koersif” ke “otoritas persuasif”.¹⁰

Pertama, Otoritas “koersif” adalah suatu kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis, mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Otoritas koersif pada umumnya mengandalkan posisi struktural seseorang. Ketika seseorang membujuk orang lain, dan kemudian dia ditaati, maka ketaatannya lebih disebabkan oleh posisi strukturalnya, bukan berdasarkan kesadaran orang yang taat terhadap pribadi pejabat tersebut. Boleh saja, saya tidak setuju dengan pendapat pimpinan saya, tetapi ketidaksetujuan itu harus dikesampingkan karena dia atasan saya yang harus ditaati.

Kedua otoritas “persuasif”, yakni otoritas yang melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Otoritas model ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengarahkan keyakinan atau perilaku orang lain atas dasar kepercayaan dan persuasi, bahwa melakukan atau tidak melakukan adalah sesuatu yang seharusnya. Seseorang yang mempunyai otoritas persuasif ditaati bukan karena sesuatu yang bersifat struktural sebagaimana yang pertama, melainkan

¹⁰ Khaled Abou El Fadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (England: Oneworld Oxford, 2003), hlm. 18.

karena kapasitas pribadi. Seseorang taat kepadanya didasarkan pada adanya keahlian khusus atau kharisma pada orang tersebut, sehingga ketaatan orang lain kepadanya benar-benar berangkat dari pengakuannya atas kemampuannya dalam bidang tertentu dan juga kharisma yang dimiliki orang itu, bukan karena tekanan tertentu yang bersifat struktural.¹¹

Namun otoritas “persuasif” tersebut bisa mengalami pergeseran dan berubah menjadi otoritas “koersif” jika seseorang atau kelompok yang mempunyai kharisma atau keahlian khusus tersebut “menempatkan dirinya atau ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai otoritas” dan kemudian “mengenyampingkan pihak lain yang mungkin juga mempunyai otoritas yang sama dengan mereka”. Di situlah menurut Khaled muncul apa yang disebut dengan tindakan “otoritarianisme” pembaca dalam mencari pesan Tuhan.

Sejalan dengan itu, otoritarianisme keilmuan pada gilirannya melahirkan tindakan kekerasan, baik kekerasan wacana maupun kekerasan fisik. Muktaizilah yang menjadi simbol rasionalis Islam klasik dan sudah berubah wujud menjadi ideologi negara pada masa kekhalifahan Abbasiyah “memaksa” Ahmad bin Hambal untuk mengakui pemikiran “al-Qur’an itu diciptakan”. Ketika Ahmad bin Hambal tidak bersedia mengikuti paksaan itu (kekerasan wacana), tentu saja dia mendapat hukuman yang setimpal (kekerasan fisik) dari penguasa kala itu.

Untuk menghindari terjadinya pergeseran-pergeseran itu pada kelompok moderat khususnya, dan agar ia tetap menjadi paradigma, saya perlu menampilkan pemikiran Lukman Hakim Saifuddin,¹² yang menjadi pelopor pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia, yang membedakan “moderasi agama” dengan “moderasi beragama”. Yang pertama berbicara tentang esensi agama, yang kedua berbicara tentang subyek yang beragama. Esensi agama menurut Lukman adalah memanusiakan manusia, sehingga persoalan keagamaan sejatinya diselesaikan dengan cara yang manusiawi. Diantara cara yang manusiawi itu adalah beragama secara moderat yang kini dikenal dengan nama “moderasi beragama”.

Moderasi beragama diartikan sebagai “ikhtiyar beragama yang tidak berlebihan, sehingga tidak melampaui batas”. Pengertian sederhana itu didasarkan pada asumsi bahwa selalu terjadi

¹¹ Dalam menjelaskan teori otoritas, Khaled mengaitkannya dengan teori otoritas Friedman. Friedman membaginya menjadi dua bentuk otoritas, yakni memangku otoritas (*bieng in outhority*) dan memegang otoritas (*bieng an authority*). Yang pertama sama dengan otoritas koersif, dan yang kedua sama dengan otoritas persuasif yang ditawarkan Khaled. Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam hal memegang otoritas atau otoritas persuasif dibutuhkan adanya “praduga epistemologis” (*epistemological presupposition*). Dalam arti, harus ada kesamaan pandangan antara orang yang diikuti dan yang mengikuti. Kendati demikian, orang yang mengikuti otoritas orang lain tersebut harus pula menggunakan “nalar eksklusif” (*exclusionary reasons*), yakni suatu nalar yang dapat memutuskan secara bebas apakah dia akan mengikuti otoritas orang tersebut atau tidak. *Ibid.*, hlm. 18-21

¹² Pemikiran Lukman Hakim Saifuddin, disampaikan pada pelatihan TOT moderasi beragama di Bandung pada tgl 23-28 Desember 2023

penafsiran yang bukan hanya berbeda, tetapi juga berseberangan di kalangan penafsir kitab suci agama, yakni penafsiran yang berorientasi pada teks semata, sembari melupakan kontek; dan penafsiran yang terlalu mengutamakan akal pikiran, sembari mengabaikan teks. Maka pengertian sederhana tentang moderasi beragama itu bersifat interpretatif, bukan konseptual

Dalam pengertiannya yang lebih luas, moderasi beragama didefinisikan sebagai “cara pandang, bersikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi yang merupakan kesepakatan Bersama”. Definisi ini menegaskan bahwa moderasi beragama digunakan dalam konteks kehidupan bersama, bukan individu. Dalam konteks kehidupan bersama, sejatinya seseorang beragama secara moderat.

Pengertian yang luas itu dijabarkan oleh Lukman: Pertama, frase “dalam kehidupan bersama”. Maksudnya, penguatan cara pandang, sikap dan praktik moderasi beragama itu menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan individu. Moderasi beragama tidak mengintervensi kehidupan pribadi. Kedua, frase “mengejawantahkan esensi ajaran agama” dimaksudkan bahwa beragama harus bersifat substantif yang selalu mengedepankan esensi daripada ritual atau simbol. Ketiga, frase, “yang melindungi martabat kemanusiaan” menegaskan bahwa moderasi beragama dibangun di atas kesadaran bahwa esensi agama adalah menjaga martabat kemanusiaan. Keempat, frase “membangun kemaslahatan umum” menandakan bahwa praktik beragama harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan individu. Nilai-nilai di atas harus selalu berlandaskan pada frase kelima, yakni prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi”. Atas prinsip yang terakhir itu, maka beragama tidak boleh melanggar ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar.

Esensi beragama yang moderat itu kemudian diacukan pada sembilan kata kunci: kemanusiaan, kemaslahatan, keadilan, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penghormatan atas tradisi, yang itu semua diturunkan dari definisi dan indikator-indikator moderasi beragama.¹³ Sembilan kata kunci beragama itu menurut Lukman merupakan pokok inti dari agama, dan seseorang disebut tidak moderat dalam beragama jika mengabaikan pokok inti agama itu sendiri. Ajaran inti agama itu dimiliki semua agama, baik agama bumi (ardi) maupun langit (samawi).

¹³ Kemenag, Moderasi Beragama,.....

Tentu saja, kesembilan kata kunci moderasi beragama itu bukan harga mati karena moderasi beragama adalah sebuah proses yang tak akan pernah berhenti. Moderasi beragama merupakan cara, jalan yang menempatkan dialog sebagai proses utama dalam memahami agama. Dialog terus menerus itu merupakan tugas para penafsir agama. Pemahaman mereka sejatinya tidak hanya berhenti pada teks kitab suci agama semata, yang membuat pemahaman menjadi tektualis karena melepaskan peran konteks, juga tidak hanya bertumpu pada konteks pembaca, yang membuat pemahaman menjadi dekontekstualisasi karena melepaskan peran teks, melainkan bertumpu pada proses dialog terus menerus antara teks kitab suci dengan pembaca dan masyarakat penggunaannya yang senantiasa mengalami proses perubahan.

Sejalan dengan itu, Islam dikatakan sebagai agama yang moderat karena cara berfikir penganutnya yang dialogis dalam memahami Islam. Dengan cara berfikir dialogis itu, Islam akan berdialog secara apresiatif, kritis dan produktif dengan realitas kehidupan manusia yang beragaman dan senantiasa mengalami perubahan. Hal itu sejalan dengan watak Islam sendiri, yakni teoritis, dialogis dan praksis. Ketiga watak Islam itu saling berhubungan.

Di antara watak teoritis Islam adalah ajarannya yang bersifat universal. Islam berbicara tentang manusia dan kemanusiaan secara universal tanpa melihat agamanya, etnisnya, jenis kelaminnya dan warna kulitnya. Islam yang berwatak universal ini tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia mengatasi ruang dan waktu. Ia hadir untuk membela siapapun yang hidup dalam ruang waktu yang berbeda. Gus Dur menyebutnya sebagai universalisme Islam.¹⁴

Watak kedua dari Islam adalah dialogis. Sejak awal kehadirannya, Islam yang bersumber pada al-Qur'an yang menurut Abdul Karim Soros berdimensi Ilahi-basyari itu¹⁵ mempunyai dua unsur asasi, yakni unsur yang tetap dan unsur yang berubah. Unsur yang tetap adalah dimensi ilahinya yang sakral, universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, sedang unsur yang berubah adalah dimensi basyarinya yang partikular, profan dan terikat oleh ruang dan waktu. Yang bersifat dialogis adalah dimensi basyarinya. Sementara dimensi ilahinya sejatinya dijadikan pijakan prinsipil dalam mendialokkan dimensi basyariah Islam dengan budaya atau peradaban manusia, baik secara apresiatif, kritis maupun dan terutama produktif. Bukan purifikatif.

Di antara dialog apresiatifnya adalah ketika al-Qur'an menggunakan unsur-unsur peradaban lokal Arab di awal kehadirannya, misalnya bahasa arab lokal yang digunakan al-Qur'an, budaya dan kisah-kisah lokal yang ditampilkan al-Qur'an. Semuanya berasal dari

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 3-8

¹⁵ Abdul Karim Soros, *Bast Tajribah al-Nabawiyah*, (Bairut: Dar al-Jadid, 2009), hlm. 36-37

peradaban Arab. Di antara dialog kritisnya adalah ketika al-Qur'an mengkritik moralitas Masyarakat Arab yang tidak manusiawi, seperti tentang perbudakan dan perempuan. Sedang di antara dialog produktifnya adalah ketika al-Qur'an berdialog dengan peradaban Arab yang melahirkan disiplin keilmuan Islam berupa fikih dan kalam; ketika berdialog dengan peradaban Persia yang melahirkan disiplin keilmuan tasawuf; dan ketika berdialog dengan peradaban falsafah Yunani yang melahirkan disiplin keilmuan filsafat Islam.

Karena watak dialogisnya yang bersifat apresiatif, kritis dan produktif dengan peradaban-peradaban itulah, Gus Dur menyebut Islam berwatak Kosmopolit.¹⁶ Dengan demikian, secara konseptual bisa dikatakan bahwa moderatisme Islam adalah moderatisme kosmopolit. Ketika watak kosmopolitanisme Islam itu didialogkan dengan peradaban-peradaban luar, tidak hanya melahirkan disiplin keilmuan sebagaimana dialognya dengan tiga peradaban di atas, tetapi juga memunculkan sebuah model Islam yang berwatak pribumi. Gus Dur menyebutnya sebagai Islam pribumi.

Islam pribumi adalah Islam yang berdialog dengan budaya lokal. Namun yang didialogkan dengan budaya lokal itu bukan ajaran normatifnya, seperti shalat, zakat, puasa, naik haji dan sebagainya, melainkan dimensi budayanya (basyariahnya). Ketika mengerjakan shalat sebagai ajaran normatif Islam, seseorang harus menggunakan bahasa arab, termasuk ketika mengucapkan salam "assalamu'alaikum". Tetapi ketika bertemu dengan orang lain di luar shalat, dia boleh menggunakan bahasa Indonesia "selamat pagi, selamat sore, selamat malam", dan sebagainya lantaran ucapan itu masuk ke dalam kategori budaya, bukan ajaran normatif Islam.

Watak dialogis (kosmopolit) Islam itulah yang membuat Islam mudah diterima di Indonesia lantaran sejalan dengan watak bangsa Indonesia yang oleh Gus Dur disebut negerinya kaum moderat. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui peperangan dan paksaan. Begitu juga, Islam datang ke Indonesia tidak hendak membersihkan atau mempurifikasi budaya lokal, melainkan berdialog dengan budaya lokal, menjadikan budaya lokal sebagai mitra dalam beragama, sehingga beragama menjadi tidak kering, sebagaimana berbudaya menjadi tidak sekular. Inilah watak moderatisme Islam, yakni moderatisme yang kosmopolit.

Bagaimana moderatisme kosmopolit memandang persoalan negara dan kehidupan antarumat beragama di Indonesia? Dalam konteks bernegara, Islam menerima bentuk negara apapun, termasuk NKRI sebagai sesuatu yang harus diterima, karena bentuk negara itu

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, hlm. 8-10

merupakan bagian dari budaya Indonesia yang sejatinya diposisikan sebagai metra dialogis dengan dimensi budaya Islam. Islam tidak mengharuskan adanya bentuk negara tertentu, seperti negara Islam.¹⁷ Apapun bentuk negaranya asal Islam diberi ruang untuk eksis dan umat Islam diberi kebebasan beragama, ia tetap diterima. Begitu juga dalam kehidupan beragama.¹⁸

Saat ini, moderatisme Islam seolah menjadi wasit kehidupan beragama di Indonesia. Karena moderasi beragama mengajak umat untuk kometmen bersama dalam menjaga keseimbangan yang paripurna, dimana setiap warganegara, apapun suku, etnis budaya, agama dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain. Serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.¹⁹

Peran moderatisme Islam sebagai wasit dalam kehidupan beragama penting lantaran belakangan mulai ramai aliran radikal Islam dari Timur Tengah seperti HTI, FPI dan sebagainya. Dengan kehadiran mereka, beragam konflik muncul di Indonesia, lantaran mereka tidak hanya mengkafirkan orang-orang non-Islam yang ada di Indonesia, tetapi juga hendak mempurifikasi Islam dari budaya lokal, sembari menempatkan budaya lokal sebagai sesuatu yang negatif, bid'ah, syirik, thaghut dan sebagainya. Orang Islam selain mereka pun yang coba mendialokkan dimensi budaya Islam dengan budaya lokal, seperti orang-orang NU dituduh kafir, pelaku bid'ah. Pada saat itulah, konflik muncul. Karena kelompok radikal Islam senantiasa hadir, maka daerah-daerah tertentu yang menampakkan kehidupan harmonisnya antarumat beragama berpotensi terjadinya konflik. Di bawah ini adalah contoh sederhana tentang harmoni yang berpotensi konflik dalam kehidupan beragama di Ponorogo,²⁰ teruma ketika kelompok radikal masuk ke sana.

Menengok Kembali Kampung Toleran, Dusun Sodong

Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur yang mempunyai keragaman dalam beragama. Di sana, ada agama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Budha dan Kejawen. Jumlah mereka bervariasi. Dusun Sodong, yang menjadi contoh kasus tulisan ini, terletak di Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. Dusun ini dihuni oleh 60% umat muslim

¹⁷ Pemikir yang secara eksplisit berpendapat demikian adalah Ali Abdur Razik. Ali Abdurrazik, *al-Islam wa Usul al-Hukmi, al-Khilafah wa al-Hukummah fi al-Islam*, cet. ke 3, (Kairo:Shirkah Mahimah, 1925); pandangan saya tentang bernegara menurut Islam dapat dilihat karya saya: Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung:Mizan, 2018).

¹⁸ Pandangan saya tentang kehidupan beragama di Indonesia, dapat dilihat karya saya: Aksin Wijaya, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2009); Aksin Wijaya, *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia: Dari Berislam secara Teologis ke Berislam secara Humanis*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019).

¹⁹ Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia", *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kemenag 2019), hlm. V-vi.

²⁰ Deskripsi tentang kehidupan beragama di dusun Sodong Ponorogo merupakan ramuan dari diskusi bersama, Nur Rif'ah Hasaniy, Mahasiswa Pascasarjana, CRCS UGM, pada awal oktober 2023.

dan 40% Buddha.

Meskipun dihuni oleh dua kelompok masyarakat dengan agama yang berbeda, namun praktik sosial masyarakat Sodong mencerminkan hubungan yang harmonis, damai dan toleran. Bahkan sebagian orang menyebut Sodong sebagai kampung Budha, kendati penganut Islamnya lebih banyak. Di antara kegiatan yang mencerminkan kerukunan umat beragama di Sodong adalah kebersamaan mereka dalam merayakan hari raya keagamaan seperti hari raya idul fitri dan hari raya waisak.

Pada hari raya idul fitri, umat Buddha berziarah ke rumah warga muslim, dan begitu pula sebaliknya (detik.com). Seperti biasanya, Masyarakat Ponorogo selalu merayakan kegiatan Suroan. Peringatan malam satu Suro yang dilakukan dengan doa, ritual sedekah bumi, dan upacara adat dilakukan bersama baik oleh umat Islam maupun Buddha di Sodong (beritasatu.com). Selain itu, tempat ibadah kedua pemeluk agama yang berbeda itu juga ada di sana, seperti Vihara Dharma Dwipa dan Masjid Sirotol Mustaqim (jatimnetwork.com). Dengan demikian, tampak bahwa nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari praktik kehidupan harmoni masyarakat Sodong.

Apakah harmoni kehidupan Masyarakat Sodong itu benar-benar terbentuk karena pemahaman keagamaan yang moderat dan toleran? Ataukah ada faktor lain yang dominan?

Saya berhipotesis, kehidupan yang harmonis dan damai di Sodong tampaknya dipengaruhi oleh tradisi lokal, kendati peran agama juga ada. Tradisi lokalnya tampaknya lebih kuat daripada paham keagamaannya yang moderat dan toleran, karena Sodong bukanlah daerah yang masyarakatnya terdidik secara keagamaan sebagaimana daerah lain. Kawin campur antar penganut agama yang berbeda, yang di dalam Islam masih dilarang, sudah biasa terjadi di antara mereka. Dalam satu keluarga bisa terdapat tiga agama, dan bisa terjadi, satu keturunan menganut agama yang berbeda. Ketika saling bersilatullahmi dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan, mereka biasanya melakukannya tanpa melihat dimensi teologis di dalamnya.

Kondisi seperti ini berpotensi munculnya konflik jika suatu saat kondisi tradisi dan keberagaman di sana mengalami perubahan. Salah satu indikasinya adalah ketika saya berbicara tentang adik perempuan salah seorang tokoh yang beragama Islam di sana, yang menikah dengan seorang laki-laki penganut agama Budha. Dia mengatakan, "Saya tidak bisa berkomentar kalau soal itu, kalau soal agama, terserah mereka saja, soal dosa biar ditanggung sendiri, yang penting kita sebagai saudara saling membantu".

Komentar seperti itu menandakan, ada sesuatu yang tak terkatakan dalam kehidupan

Masyarakat Sodong yang berpotensi menjadi konflik. Karena ternyata, terdapat pandangan teologis yang menilai negatif keyakinan agama Budha, karena bapak yang saya wawancarai tadi masih berbicara tentang dosa dan sebagainya. Karena itu, kerukunan umat beragama, dan sikap toleransi masyarakat Sodong tidak benar-benar didasarkan pada pemahaman yang kuat akan nilai-nilai toleransi beragama. Ia lebih kuat nilai-nilai sosiologis atau tradisinya.

Hipotesis ini diperkuat oleh suatu penelitian yang menyebutkan bahwa, pemaknaan terhadap perbedaan agama pada masyarakat Sodong dilandaskan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Ayat ini tidak digunakan sebagai suatu nilai universal yang disepakati bersama tetapi lebih pada pengabaian eksistensi agama lain. Terlebih lagi, Surat Al-Kafirun ini turun dalam konteks masyarakat Arab jahiliyah yang disebut kafir karena menolak ajaran Islam. Oleh karena itu, ayat ini menurut Nur Ruf'ah Hasaniy yang sedang melakukan penelitian di sana, menjadi ambigu ketika diterapkan sebagai landasan toleransi dan moderasi dalam konteks masyarakat Sodong. Alih-alih menjadi landasan teologis yang benar, ayat ini ketika dipahami lebih dalam justru menunjukkan tidak kuatnya landasan teologis masyarakat Sodong.

Bahwa kehidupan beragama di Sodong bisa terancam konflik karena pada hakikatnya, tradisi atau budaya merupakan sesuatu yang dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan ruang dan konteks suatu masyarakat. Perubahan konteks sosial itu akan berdampak pada berubahnya makna sosial dan tindakan individual. Perubahan konteks sosial dalam masyarakat Sodong misalnya tampak pada:

Pertama, bagaimana anak-anak sebagai generasi penerus budaya mulai meninggalkan desa baik untuk pendidikan, mencari pekerjaan atau menikah. Hilangnya generasi penerus, memungkinkan munculnya celah dalam penanaman nilai keragaman dan pewarisan budaya. Kedua, sebagai kelompok yang memiliki keragaman agama, masyarakat Sodong kerap menjadi sasaran penyebaran ideologi tertentu. Hal ini misalnya ditandai dengan masuknya ajaran Islam puritan, yakni ajaran yang ingin mengembalikan kemurnian Islam. Akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan tersebut menunjukkan adanya potensi konflik yang mungkin terjadi akibat perubahan-perubahan konteks sosial pada masyarakat Sodong.

Maka, untuk menghindari mencuatnya potensi konflik itu, sudah sewajarnya jika kita mengajarkan secara massif paham keagamaan yang moderat kepada mereka, sebelum kehadiran kelompok radikal ke sana. Kita ajarkan mereka bahwa beragama tidak boleh ekstrim, beragama harus moderat, dan beragama harus bersikap toleran, menghargai dan menerima kehadiran yang

lain. Kondisi harmonis dan damai yang sudah tersemayem selama bertahun-tahun di sana sejatinya dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam yang tentu saja sejalan dengan tradisi dan budaya lokal yang ada di sana. Dengan demikian, jika suatu saat datang seorang pendakwah yang mengajarkan Islam puritan atau radikal, mereka sudah mampu menangkalnya, baik menggunakan perspektif budaya yang mereka jalani selama ini maupun perspektif agama, baik Islam maupun Budha.

KESIMPULAN

Moderasi beragama sejatinya sudah lama berkembang sejak periode awal kehadiran Islam, dan kehadirannya selalu sebagai respon atas pemikiran dan sikap radikal dalam beragama. Moderasi beragama yang menurut saya tepat digunakan di Indonesia adalah moderasi beragama yang dialogis dengan realitas, karena agama Islam pada dasarnya mempunyai watak teoritis, dialogis dan praksis. Dengan watak dasar Islam itu, kita bisa melihat realitas secara apresiatif, kritis dan produktif. Kita bisa mengapresiasi fenomene keberagamaan yang toleran, tentu tanpa mengurangi sikap kritis dan solusi-solusi baru dalam mengatasi potensi konflik atasnama agama seperti di Sodong, Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isyah, al-Amir Mahfuz, *al-Wasatiyah fi al-Islam: Dirasah Hawla Manhaj al-Wasatiyah al-Islamiyah, Fikran wa Mumarasatan*, (Kairo: Dar al-Basya'ir, 2015).
- Abu Zayd, Nasr Hamid, *al-Imam al-Syafi'i wa ta'sis al-Ideologiyah al-wasatiyah* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1996)
- El Fadl, Khaled Abou, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (England: Oneworld Oxford, 2003),
- Hasaniy, Nur Rif'ah, Mahasiswa Pascasarjana, CRCS UGM, pada awal oktober 2023.
- Rasyid, Qadi Abdur, *al-Manhaj al-Islami li al-Wasatiyah wa al-I'tidal*, (Kairo: Dar al-Salam, 2010)
- Rasik, Ali Abdur, *al-Islam wa Usul al-Hukmi, al-Khilafah wa al-Hukummah fi al-Islam*, cet. ke 3, (Kairo:Shirkah Mahimah, 1925)
- Saifuddin, Lukman Hakim, "Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia", *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kemenag 2019)
- Soros, Abdul Karim, *Bast Tajribah al-Nabawiyah*, (Bairut: Dar al-Jadid, 2009)
- Tarabichi, George, *min Islam al-Qur'an ila Islam al-Hadis, al-Nasy'ah al-Musta'nafah*, (Bairut: Dar al-Saqi, 2011)
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)
- Wijaya, Aksin, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik Atas Nalar Agamaisasi*

Kekerasan, (Bandung:Mizan, 2018).

_____, "Menafsir al-Qur'an Secara Bijak: Beruswah Hasanah pada Cara Berkomunikasi Tuhan" dalam Aksin Wijaya (penyunting) *Dinamika Pemikiran dan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta:IRCiSod)

_____, *Fenomena Berislam: Genalogi dan Orientasi Berislam Menurut al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2022)

_____, *Hidup Beragama dalam Sorotan UUD 1945 dan Piagam Madinah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2009)

_____, *Kontestasi Merebut Kebenaran Islam di Indonesia: Dari Berislam secara Teologis ke Berislam secara Humanis*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019).